

ABSTRAK

Qamara Ashara, Mekanisme Pemekaran Daerah Kabupaten Kota dan Peran Dewan Perwakilan Daerah Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (MD3) Studi Kasus Pemekaran Daerah Kabupaten Garut Selatan.

Otonomi Daerah sangat berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, Pemekaran Wilayah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, agar lebih efisien dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah.

Tujuan yang diteliti dalam penelitian ini adalah, untuk mekanisme pemekaran daerah di Indonesia, bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan dan mengetahui pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Daerah terkait pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan *yuridis empiris* mengenai bagaimana mekanisme pemekaran daerah kabupaten kota dan peran Dewan Perwakilan Daerah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 studi kasus pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan. Penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Mekanisme mengenai pemekaran daerah beberapa daerah ada yang menggunakan Peraturan Pemerintah Tahun 2017, sementara Provinsi Jawa Barat Menggunakan Rancangan Peraturan Pemerintahan tentang Penataan Daerah 2). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan terjadi beberapa kendala dikarenakan persyaratan administrasi sebelum akhirnya dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh 129 desa di 15 kecamatan yang akan berpisah dari kabupaten induk ke Kabupaten Garut Selatan 3). Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan pemekaran daerah di kabupaten garut selatan yaitu jumlah desa dan Transfer dana desa, sumber daya alam yang berdampak pada pendapatan asli daerah. Prestasi daerah otonomi baru dan moratorium.

Kata Kunci : *Dewan Perwakilan Daerah, Pemekaran, Kabupaten Garut Selatan*